

ABSTRAK

PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN PADA KAWASAN INDUSTRI OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI PADA PT. SOLID MIX BANDAR LAMPUNG)

Oleh

Isnaini Apriani

**Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jalan Prof. Dr. Soemantri Bojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145
Email: isnainiapriani3@gmail.com**

Dalam rangka efektifitas penegakan perizinan lingkungan, maka diperlukan instrument penegakan hukum lingkungan yaitu berupa pengawasan dan sanksi administrasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pengawasan izin lingkungan yang diberikan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung menjadi kewenangan Walikota Bandar Lampung yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Pengawasan izin lingkungan bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengawasan izin lingkungan pada PT. Solid Mix serta bagaimanakah tindak lanjut dari pengawasan izin lingkungan yang dilakukan oleh DLH pada PT. Solid mix? Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil berdasarkan studi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, naskah akademik serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil Penelitian: (1) Pengawasan dilakukan secara langsung minimal 6 bulan sekali pertahun, yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan juga melalui pelaporan data-data yang diberikan pihak perusahaan kepada DLH, (2) Tindak lanjut setelah proses pengawasan bahwa perusahaan agar dapat melengkapi dan memperbaiki dokumen dan perizinan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, DLH Kota Bandar Lampung berhak menindak lanjut perusahaan dengan melakukan pemberian sanksi berupa teguran, ataupun sanksi administratif.

Kata Kunci: Pengawasan; Izin Lingkungan; Kawasan Industri

ABSTRACT

THE SUPERVISION ON ENVIRONMENTAL PERMITS IN INDUSTRIAL AREA CONDUCTED BY ENVIRONMENTAL DEPARTMENT OF BANDAR LAMPUNG CITY (A STUDY ON PT. SOLID MIX BANDAR LAMPUNG)

By

Isnaini Apriani

**The Division of State Administrative Law, Faculty of Law, University of
Lampung**

Prof. Dr. Soemantri Bojonegoro Street No.1 Bandar Lampung, 35145

Email: isnainiapriani3@gmail.com

In order to achieve an effective enforcement on environmental permits, it is important to have some instruments of environmental law enforcement in form of supervision and administrative sanctions. In accordance with Law Number 32 Year 2009 Concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH), the supervision of environmental permits granted by the Regional Government of the City of Bandar Lampung has become the authority of the Mayor of Bandar Lampung, which in its implementation is delegated to the Environmental Department of the City of Bandar Lampung. In this study, the supervision of environmental permits aims to determine the supervision of environmental permits at PT. Solid Mix and to determine the follow up of the environmental permit monitoring conducted by Environmental Department at PT. Solid mix. This study applied normative and empirical approaches. The data sources consisted of primary and secondary data. The primary data were obtained through field studies, while the secondary data were obtained through literature study by studying the laws and regulations, books, academic texts and journals related to the issues being discussed. The research results: (1) The supervision was carried out directly at least once every 6 months by the Environmental Supervisory Officer (PPLH) and also through reporting of data provided by the company to the Environmental Department (DLH) (2) Regarding the follow-up of the monitoring process, that the company must be able to complete and revise the documents and permits related to environmental protection and management, the DLH of Bandar Lampung also has the right to convict the companies by giving sanctions in form of reprimands or administrative sanctions.

Keywords: Supervision; Environmental Permit; Industrial Area